



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Jepara menetapkan Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Jepara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
10. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pengelolaan Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati Jepara ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Jepara ini.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

1. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi dasar dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
2. Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dengan cara:

a.
$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = DD setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Petinggi adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan DD.
- (2) Petinggi menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa sesuai RPJMDes.
- (3) Petinggi menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk dibahas dan mendapat kesepakatan bersama.

Pasal 6

- (1) RAPBDes yang telah disepakati bersama oleh Petinggi dan BPD dikirimkan kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Setelah Perdes tentang APBDes diundangkan dalam Lembaran Desa maka Petinggi menyusun dan mengesahkan DPA.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim yang melibatkan anggota LKMD/LPMD, masyarakat dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing - masing.

Pasal 7

Guna mencairkan DD setiap desa membuka rekening atas nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah.

Pasal 8

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan desa Petinggi menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Carik, Kaur Keuangan dan Perangkat Desa lainnya dengan SK Petinggi

Pasal 9

Guna pengoptimalan pengelolaan DD, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal (9) adalah:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan DD dan penyusunan RPJMdesa, RKPdes, RAPBDes, APBDes, RAB dan DPA;
- b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan DD yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan DD;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan DD.
- e. Menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan keuangan Desa setiap bulan.
- f. Menyampaikan Rekapitulasi Laporan bulanan Penggunaan ADD Kepada Bupati Jepara.

Pasal 11

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal (9), adalah:

- a. Melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan DD;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan DD;
- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan DD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan DD;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati

Pasal 12

- (3) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa.
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa, RPJM Desa, RKP Desa.
 - b. laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dan b.
- (5) Penyaluran DD Tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan DD sebelumnya.
 - b. Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (7) Mekanisme pengajuan DD diatur sebagai berikut:
- a. Petinggi mengajukan permohonan pencairan DD kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Camat.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan berkas sebagai berikut:
 1. Rencana penggunaan DD.
 2. Pakta integritas/ pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh petinggi diatas materai 6000.
 3. Foto copy KTP petinggi, bendahara desa dan rekening buku kas desa.
 - c. Camat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam bentuk cek list.
 - d. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar pencairan DD dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati cq DPPKAD.

- e. Berdasarkan permohonan pencairan DD yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud, Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 13

DD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang meliputi:

- (1) Prioritas Penggunaan DD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan yang berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal desa serta untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disepakati dalam musyawarah desa yang tertuang dalam APBDesa;
- (2) Dalam penentuan prioritas sesuai ayat (1) maka berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa dengan memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyaluran DD kepada Bupati setelah menerima DD yang telah dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa melalui camat sebagaimana form terlampir.
- (2) Petinggi dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD setiap akhir tahapan sebagaimana form terlampir;
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai persyaratan untuk penyaluran DD selanjutnya;
- (4) Petinggi menyampaikan laporan pertanggungjawaban DD kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran sebagaimana form terlampir.

- (5) Bukti penggunaan, bukti fisik S/D dan bukti penggunaan keuangan DD harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh desa tentang kebenaran dokumen tersebut;
- (6) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan DD hanya dapat diperiksa oleh lembaga pengawas fungsional dan lembaga pengawas lainnya.
- (7) Petinggi penerima DD bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan DD.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan DD.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi administrasi penyaluran dan penggunaan DD.
- (4) Pemantauan sebagaimana ayat (3) dapat dilakukan terhadap:
- a. Penerbitan peraturan petinggi maupun keputusan petinggi tentang pengelolaan keuangan DD.
 - b. Penyaluran DD dari rekening kas desa kepada pelaksana kegiatan.
 - c. Penyampaian laporan realisasi administrasi penggunaan DD.
 - d. SiLPA DD.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan terhadap:
- a. Perhitungan rencana penggunaan DD.
 - b. Realisasi administrasi penggunaan DD.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

Pasal 17

- (1) Pengawasan penggunaan DD bisa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Masyarakat maupun oleh lembaga pengawasan Fungsional lainnya;
- (2) Hasil Pengawasan menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

BAB IX
SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) dan (5) maka bupati dapat menunda penyaluran DD yang menjadi hak desa yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengurangi penyaluran DD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) SiLPA DD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa sisa DD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari DD yang diterima Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Januari 2016

BUPATI JEPARA
- *AHMAD MARZUQI*
AHMAD MARZUQI

Diundangkan Di Jepara
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 5

PENELITI/PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Kepala Biro	<i>[Signature]</i>
Agensi	<i>[Signature]</i>
Wakil	<i>[Signature]</i>
Kasub	<i>[Signature]</i>
Ketua BPPK Pengawal	<i>[Signature]</i>
E-ASIAN HUKUM	

DAFTAR DESA UMTUR DESA SE KABUPATEN JEPARA
 TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formule										Pagu Dana Desa per-Desa	JUMLAH DA									
		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot								
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				(14)	(15)	(17)					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
KEC. REDUNG																						
BEKINGMALANG	565.640.000	4722	0.43%	0.11%	769	0.01	0.20%	4.60	0.40%	0.05%	23.50	0.40%	0.12%	0.47%	97.647.257	663.287.257	663					
KALAYAR	565.640.000	578	0.05%	0.01%	80	0.00	0.02%	1.83	0.10%	0.02%	40.65	0.69%	0.21%	0.26%	33.387.210	619.027.210	819					
KARANGAJI	565.640.000	4422	0.40%	0.10%	928	0.01	0.24%	4.07	0.41%	0.04%	19.05	0.32%	0.10%	0.48%	98.850.301	664.490.301	664					
TERINAR	565.640.000	2436	0.22%	0.06%	528	0.00	0.14%	2.58	0.20%	0.03%	28.39	0.48%	0.15%	0.36%	74.969.618	640.609.618	640					
SOWAH LOR	565.640.000	7669	0.70%	0.17%	957	0.01	0.25%	2.70	0.27%	0.03%	25.30	0.43%	0.13%	0.38%	119.379.258	685.019.258	685					
SOWAH KIDUL	565.640.000	6237	0.57%	0.14%	1280	0.01	0.33%	1.82	0.18%	0.02%	37.05	0.63%	0.19%	0.48%	140.602.841	706.242.841	706					
WARISORO	565.640.000	2319	0.21%	0.05%	388	0.00	0.10%	0.91	0.09%	0.01%	42.43	0.72%	0.22%	0.38%	78.789.326	644.420.326	644					
SURABADI	565.640.000	3729	0.34%	0.09%	676	0.01	0.18%	3.91	0.39%	0.04%	38.32	0.55%	0.20%	0.50%	102.186.960	667.826.960	667					
PANGULU	565.640.000	1990	0.18%	0.05%	373	0.00	0.10%	1.62	0.16%	0.02%	34.71	0.59%	0.18%	0.34%	69.242.608	634.882.608	634					
BEKAL BARI	565.640.000	756	0.07%	0.02%	77	0.00	0.02%	0.98	0.10%	0.01%	44.18	0.75%	0.22%	0.27%	56.252.569	621.892.569	621					
ICHPANG	565.640.000	2276	0.21%	0.05%	362	0.00	0.05%	0.86	0.09%	0.01%	43.41	0.74%	0.22%	0.38%	77.589.871	643.223.871	643					
BUREI	565.640.000	7644	0.70%	0.17%	1244	0.01	0.32%	2.98	0.30%	0.03%	22.30	0.38%	0.11%	0.64%	132.047.186	697.687.186	697					
DONGOS	565.640.000	7262	0.66%	0.17%	1297	0.01	0.34%	3.43	0.35%	0.03%	40.43	0.69%	0.21%	0.74%	153.229.111	718.869.111	718					
MENGAMATI	565.640.000	9976	0.63%	0.16%	872	0.01	0.23%	2.26	0.23%	0.02%	27.65	0.47%	0.14%	0.55%	113.237.704	678.877.704	678					
SENJO	565.640.000	4413	0.40%	0.10%	680	0.01	0.18%	1.33	0.13%	0.01%	28.96	0.40%	0.13%	0.44%	90.381.223	656.021.223	656					
TANGGUL TIAHE	565.640.000	628	0.06%	0.01%	184	0.00	0.04%	2.19	0.22%	0.02%	44.42	0.76%	0.23%	0.31%	63.333.502	628.973.502	628					
RAU	565.640.000	3235	0.29%	0.07%	665	0.00	0.17%	1.11	0.11%	0.01%	28.81	0.49%	0.15%	0.40%	81.442.481	649.082.481	649					
SUREJOHO	565.640.000	6938	0.63%	0.16%	1286	0.01	0.33%	3.83	0.39%	0.04%	35.04	0.60%	0.18%	0.71%	146.275.313	711.915.313	711					
KEC. PECANGGAH																						
PAKEMBO	565.640.000	3095	0.28%	0.07%	544	0.00	0.14%	2.99	0.30%	0.03%	25.10	0.43%	0.13%	0.37%	76.297.982	641.937.982	641					
KARANGARUM	565.640.000	6213	0.57%	0.14%	522	0.00	0.14%	3.77	0.38%	0.04%	29.23	0.50%	0.15%	0.46%	95.724.114	641.364.114	641					
GERBO	565.640.000	1659	0.15%	0.04%	194	0.00	0.05%	1.34	0.14%	0.01%	28.79	0.49%	0.15%	0.25%	51.281.874	616.921.874	616					
PECANGGAH KULON	565.640.000	8404	0.76%	0.19%	732	0.01	0.19%	2.01	0.20%	0.02%	17.22	0.29%	0.09%	0.49%	100.944.225	666.584.225	666					
PEMBUNIH	565.640.000	6849	0.62%	0.16%	726	0.01	0.19%	4.38	0.44%	0.04%	24.78	0.51%	0.15%	0.54%	111.483.964	677.122.964	677					
TRONO	565.640.000	20700	1.88%	0.47%	2200	0.02	0.57%	7.11	0.72%	0.07%	28.96	0.89%	0.15%	1.20%	160.187.800	825.827.800	825					
BOJONG	565.640.000	7681	0.70%	0.17%	858	0.01	0.22%	3.69	0.37%	0.04%	30.68	0.52%	0.16%	0.59%	121.959.999	687.589.999	687					
ELUCARAY	565.640.000	5511	0.50%	0.13%	215	0.00	0.06%	2.45	0.25%	0.02%	28.88	0.49%	0.15%	0.35%	72.864.665	638.504.665	638					
LEBUAWI	565.640.000	5897	0.54%	0.13%	444	0.00	0.12%	1.59	0.16%	0.02%	29.64	0.51%	0.15%	0.42%	86.185.840	631.625.840	631					
CEMULING	565.640.000	3827	0.35%	0.09%	372	0.00	0.10%	2.39	0.24%	0.02%	40.38	0.69%	0.21%	0.41%	85.383.228	651.023.228	651					
PECANGGAH WITAN	565.640.000	4109	0.37%	0.09%	202	0.00	0.05%	1.12	0.11%	0.01%	31.90	0.54%	0.16%	0.32%	66.033.991	631.673.991	631					
PRASAK	565.640.000	7366	0.67%	0.17%	645	0.00	0.17%	2.57	0.26%	0.03%	22.99	0.39%	0.12%	0.48%	98.657.579	664.297.579	664					

111-114
 4

Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	JUMLAH DANA		
		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Efektif		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Bobot					
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(12)	(13)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (17)
EE. WELAHAN	585.640.000	3170	0.29%	0.07%	555	0.00	0.14%	6.55	0.45%	0.05%	27.25	0.46%	0.14%	0.40%	82.755.010	648.395.010
JULING PANDAN	585.640.000	1612	0.15%	0.04%	249	0.00	0.06%	1.07	0.11%	0.01%	28.52	0.49%	0.15%	0.26%	53.162.025	638.802.025
KARANGANYAH	585.640.000	2284	0.21%	0.05%	365	0.00	0.09%	1.40	0.14%	0.01%	30.35	0.52%	0.16%	0.32%	65.141.322	650.781.322
GUWOSOROKERTO	585.640.000	2926	0.27%	0.07%	369	0.00	0.10%	1.17	0.12%	0.01%	40.30	0.69%	0.21%	0.38%	78.377.080	664.017.080
SEDUNG SARIMUKYO	585.640.000	3068	0.28%	0.07%	253	0.00	0.07%	1.64	0.17%	0.02%	41.57	0.71%	0.21%	0.36%	79.145.375	664.785.375
BUJUGO	585.640.000	8462	0.77%	0.19%	908	0.01	0.24%	2.63	0.27%	0.03%	17.74	0.30%	0.09%	0.55%	112.465.845	678.105.845
WELAHAN	585.640.000	1559	0.14%	0.04%	176	0.00	0.05%	0.98	0.10%	0.01%	22.02	0.37%	0.11%	0.20%	41.967.451	627.607.451
SEDENGAH	585.640.000	3370	0.31%	0.08%	497	0.00	0.13%	1.83	0.18%	0.02%	37.26	0.55%	0.16%	0.39%	80.205.358	665.845.358
KETILINGSINGOLELO	585.640.000	9789	0.89%	0.22%	1181	0.01	0.31%	2.31	0.23%	0.03%	21.91	0.37%	0.11%	0.60%	137.041.828	702.681.828
KALUPUCANG WETAN	585.640.000	9756	0.89%	0.22%	1316	0.01	0.34%	2.45	0.25%	0.03%	29.64	0.50%	0.15%	0.74%	152.543.929	718.183.929
KALUPUCANG KULON	585.640.000	2074	0.19%	0.05%	217	0.00	0.06%	0.63	0.06%	0.01%	27.15	0.46%	0.14%	0.25%	51.262.311	616.902.311
SEDANGLO	585.640.000	3098	0.28%	0.07%	524	0.00	0.14%	1.59	0.16%	0.02%	42.40	0.72%	0.22%	0.44%	90.377.163	656.017.163
KENDORINGSIDALIT	585.640.000	7534	0.69%	0.17%	926	0.01	0.24%	2.17	0.22%	0.02%	31.13	0.53%	0.16%	0.59%	122.330.024	687.970.024
HIRIBLOI	585.640.000	9934	0.90%	0.23%	658	0.00	0.17%	2.66	0.27%	0.03%	25.04	0.43%	0.13%	0.55%	113.751.602	679.391.602
TELLUR WETAN	585.640.000	3320	0.30%	0.08%	426	0.00	0.11%	0.57	0.06%	0.01%	35.17	0.60%	0.18%	0.37%	76.624.252	642.264.252
BRANTAN SEKARATI	585.640.000	12160	1.11%	0.28%	968	0.01	0.25%	2.90	0.29%	0.03%	16.77	0.29%	0.09%	0.64%	132.574.096	698.214.096
EE. MAYONG	585.640.000	2705	0.25%	0.06%	340	0.00	0.09%	1.50	0.15%	0.02%	39.14	0.67%	0.20%	0.36%	75.242.752	640.882.752
MAYONG LOH	585.640.000	1885	0.17%	0.04%	233	0.00	0.06%	1.15	0.12%	0.01%	33.56	0.57%	0.17%	0.29%	59.068.798	624.708.798
TIGAJURU	585.640.000	3814	0.35%	0.09%	465	0.00	0.12%	1.90	0.19%	0.02%	39.85	0.68%	0.20%	0.43%	88.720.108	654.360.108
PAHEEN	585.640.000	5313	0.48%	0.12%	647	0.00	0.17%	1.87	0.19%	0.02%	30.96	0.53%	0.16%	0.47%	96.073.396	661.713.396
KULUMAYAR	585.640.000	4732	0.43%	0.11%	601	0.00	0.17%	5.50	0.55%	0.06%	26.51	0.45%	0.14%	0.47%	96.946.145	662.586.145
PELANG	585.640.000	3509	0.32%	0.08%	350	0.00	0.09%	1.27	0.13%	0.01%	34.75	0.59%	0.18%	0.36%	74.453.937	640.093.937
SEANGKORHUEL	585.640.000	6237	0.57%	0.14%	561	0.00	0.15%	3.22	0.32%	0.03%	30.55	0.52%	0.16%	0.48%	98.172.695	663.812.695
EBUL	585.640.000	5558	0.51%	0.13%	545	0.00	0.14%	0.71	0.07%	0.01%	21.29	0.36%	0.11%	0.38%	79.161.562	644.801.562
HINGOROH	585.640.000	6129	0.56%	0.14%	973	0.01	0.25%	6.69	0.67%	0.07%	29.99	0.51%	0.15%	0.61%	126.261.770	691.901.770
PELAMKREB	585.640.000	4136	0.38%	0.09%	592	0.00	0.15%	4.24	0.43%	0.04%	37.23	0.63%	0.19%	0.48%	99.134.274	664.774.274
BUARAH	585.640.000	4731	0.43%	0.11%	862	0.01	0.22%	3.78	0.38%	0.04%	35.58	0.61%	0.18%	0.55%	113.663.005	679.323.005
INGRITO	585.640.000	2909	0.26%	0.07%	399	0.00	0.10%	2.83	0.29%	0.02%	34.21	0.58%	0.17%	0.37%	76.925.637	642.575.637
MAERWES	585.640.000	2221	0.20%	0.05%	414	0.00	0.11%	4.58	0.46%	0.05%	39.03	0.66%	0.20%	0.40%	83.218.347	640.858.347
DATAR	585.640.000	1807	0.16%	0.04%	338	0.00	0.09%	2.20	0.22%	0.02%	43.87	0.73%	0.22%	0.37%	76.311.198	641.951.198
PULLE	585.640.000	2614	0.24%	0.06%	263	0.00	0.07%	6.31	0.64%	0.06%	41.69	0.71%	0.21%	0.40%	83.330.127	648.970.127
SARUNG	585.640.000	10819	0.98%	0.25%	1694	0.01	0.43%	10.88	1.10%	0.11%	27.68	0.47%	0.14%	0.93%	191.615.812	757.255.812
BUJURU	585.640.000	5325	0.48%	0.12%	509	0.00	0.13%	2.38	0.24%	0.02%	27.76	0.47%	0.14%	0.42%	86.474.342	652.064.342



Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula											Papua Desa per-Desa	JUMLAH DAN			
		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					(15)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
KEC. BATEALIT	565.640.000	5144	0,47%	0,12%	912	0,01	0,24%	3,73	0,38%	2,04%	26,69	0,45%	0,14%	0,53%	108.827,247	674.467,247	
GENENG	565.640.000		0,84%	0,21%	1226	0,01	0,32%	9,62	0,97%	1,10%	27,91	0,48%	0,14%	0,77%	158.409,112	724.049,112	
KAGUKLAMITAN	565.640.000	9244	1,29%	0,24%	1041	0,01	0,27%	7,22	0,73%	0,77%	30,97	0,53%	0,16%	0,74%	178.454,575	744.108,575	
NGASEM	565.640.000		0,74%	0,32%	1410	0,01	0,37%	6,61	0,67%	0,77%	24,81	0,42%	0,13%	0,86%	181.825,075	747.465,075	
BAWU	565.640.000	8163	0,44%	0,19%	15	0,01	0,19%	4,91	0,49%	0,05%	20,86	0,35%	0,11%	0,53%	108.757,12	674.397,212	
MINIDAH	565.640.000	10529	0,42%	0,11%	70	0,01	0,19%	17,06	1,72%	0,17%	30,62	0,35%	0,16%	0,63%	129.981,054	694.621,054	
SOMOSAU	565.640.000	14375	0,42%	0,16%	73	0,00	0,14%	20,02	2,02%	0,20%	37,68	0,64%	0,19%	0,64%	131.981,119	696.821,119	
BATEALIT	565.640.000	6044	0,55%	0,14%	512	0,00	0,24%	7,81	0,79%	0,06%	31,55	0,54%	0,16%	0,62%	128.255,675	693.895,675	
BRINGIN	565.640.000	5728	0,52%	0,13%	1031	0,00	0,28%	4,31	0,43%	0,04%	40,51	0,69%	0,21%	0,56%	136.919,123	702.559,123	
WANTULING	565.640.000	7062	0,64%	0,16%	637		0,17%	2,86	0,29%	0,03%	23,28	0,40%	0,12%	0,47%	97.709,035	663.349,035	
PT. KALONGAN	565.640.000	6735	0,61%	0,15%	1088	0,01	0,28%	4,73	0,48%	0,05%	27,70	0,47%	0,14%	0,62%	128.862,217	694.502,217	
MINPAHAN RUDU	565.640.000	10081	0,92%	0,23%	802	0,01	0,21%	92	0,39%	0,04%	33,27	0,57%	0,17%	0,65%	133.439,676	699.079,676	
KEC. WAPAKA	565.640.000	4127	0,38%	0,07%	511	0,00	0,13%	3,11	0,21%	0,03%	27,67	0,47%	0,14%	0,39%	80.161,379	645.801,379	
MULYOKOREJO	565.640.000	5394	0,49%	0,12%	32	0,00	0,17%	3,27	0,33%	0,02%	26,02	0,44%	0,13%	0,46%	94.421,600	660.061,600	
KEHINGCINO	565.640.000	5271	0,48%	0,12%	523	0,00	0,08%	2,48	0,25%	0,02%	21,38	0,36%	0,11%	0,34%	59.698,423	635.338,423	
KUWASEN	565.640.000	8784	0,80%	0,20%	961	0,01	0,25%	5,86	0,59%	0,06%	23,54	0,40%	0,12%	0,63%	129.638,414	695.278,414	
MAHEMANGAN	565.640.000	1035	0,09%	0,02%	108	0,00	0,03%	1,32	0,13%	0,01%	31,52	0,54%	0,16%	0,23%	46.586,748	612.226,748	
KEC. MONGGO	565.640.000	11097	1,01%	0,25%	127	0,01	0,40%	5,93	0,60%	0,06%	29,63	0,50%	0,15%	0,86%	177.361,195	743.001,195	
MOKOREJO	565.640.000	12975	1,18%	0,30%	1860	0,01	0,40%	5,54	0,56%	0,06%	26,96	0,46%	0,14%	0,97%	200.379,138	766.019,138	
PANAWAYAL	565.640.000	11930	0,09%	0,07%	1350	0,00	0,35%	5,94	0,60%	0,06%	23,73	0,46%	0,14%	0,82%	168.958,962	734.598,962	
MAKUIJO	565.640.000	8489	0,93%	0,19%	1090	0,01	0,28%	2,67	0,27%	0,03%	24,77	0,40%	0,12%	0,52%	128.730,410	694.370,410	
KARANGGATIHUANGI	565.640.000	10200	1,45%	0,23%	893	0,01	0,23%	5,37	0,54%	0,05%	24,77	0,42%	0,13%	0,64%	132.918,982	698.589,982	
PAMBU TRIMUH	565.640.000	16389	0,37%	0,07%	1940	0,01	0,50%	12,15	1,22%	0,12%	23,29	0,40%	0,12%	1,12%	230.549,087	796.189,087	
KEC. BANGSRI	565.640.000	10398	0,55%	0,24%	1289	0,01	0,33%	3,48	0,35%	0,04%	32,53	0,55%	0,17%	0,77%	159.295,831	724.935,831	
GIYANGAN	565.640.000	10562	0,96%	0,24%	1658	0,01	0,43%	7,53	0,76%	0,08%	22,74	0,39%	0,12%	0,86%	177.923,039	743.563,039	
KEMUH	565.640.000	5588	0,51%	0,13%	975	0,01	0,23%	7,41	0,75%	0,07%	40,43	0,69%	0,21%	0,66%	136.411,815	702.053,815	
PAPABAN	565.640.000	1863	0,17%	0,04%	352	0,00	0,09%	8,63	0,87%	0,09%	38,32	0,65%	0,20%	0,42%	85.891,163	651.531,163	
BRIKAMPANG	565.640.000	5802	0,53%	0,13%	1159	0,01	0,30%	8,59	0,87%	0,09%	38,32	0,63%	0,19%	0,71%	145.831,124	711.476,248	
TEMUGLIU	565.640.000	11872	1,08%	0,27%	1584	0,01	0,41%	9,37	0,94%	0,09%	19,40	0,52%	0,16%	0,93%	191.945,466	757.584,466	
BANDUNI	565.640.000	16997	1,55%	0,39%	1612	0,01	0,43%	7,49	0,75%	0,08%	33,76	0,33%	0,10%	0,98%	202.052,134	767.696,134	
BAJARAN	565.640.000	8228	0,75%	0,19%	1271	0,01	0,33%	5,31	0,54%	0,05%	27,07	0,57%	0,17%	0,54%	153.255,465	718.945,465	
WIDELAW	565.640.000	7963	0,69%	0,17%	732	0,01	0,19%	2,09	0,20%	0,02%	33,78	0,46%	0,14%	0,52%	107.346,295	672.986,295	
KECUNGLEPER	565.640.000	9189	0,50%	0,14%	1975	0,01	0,51%	3,11	0,31%	0,03%	33,78	0,58%	0,17%	0,85%	176.646,033	742.332,033	
BERUEWANG	565.640.000	10838	0,68%	0,17%	899	0,01	0,23%	10,47	1,02%	0,10%	37,75	0,64%	0,19%	0,71%	144.078,650	709.718,650	
WONDO	565.640.000	10364	0,99%	0,25%	2039	0,02	0,53%	11	1,16%	0,12%	23,30	0,40%	0,12%	1,01%	208.393,505	774.033,505	
BAJARANBUNG	565.640.000	1024	0,56%	0,14%	1024	0,01	0,27%	4,35	0,44%	0,04%	39,87	0,68%	0,20%	0,65%	134.786,916	700.426,916	



 PT. Sinar Abadi Perkota

Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Formula											Pagu Dana Desa per-Desa	JUMLAH DANA			
	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					(15)
C. KELING	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18) = (3) + (17)	(19)
MIPUR	565,640,000	3275	0.30%	0.07%	304	0.00	0.08%	24.16	2.43%	0.24%	50.79	0.86%	0.26%	135,355,990	700,995,990	700,996
MARWULAN	565,640,000	7171	0.65%	0.16%	872	0.01	0.23%	18.37	1.85%	0.19%	44.97	0.77%	0.23%	165,885,338	731,525,338	731,525
NIH	565,640,000	2543	0.23%	0.06%	346	0.00	0.09%	7.63	0.77%	0.08%	48.03	0.82%	0.25%	96,914,856	662,554,856	662,555
TATAJI	565,640,000	2978	0.27%	0.07%	332	0.00	0.09%	6.53	0.66%	0.07%	39.59	0.67%	0.20%	87,023,845	652,663,845	652,664
PU	565,640,000	3837	0.35%	0.09%	412	0.00	0.11%	4.15	0.42%	0.04%	33.23	0.57%	0.17%	83,690,023	649,330,023	649,330
NAHAN	565,640,000	7181	0.65%	0.16%	762	0.01	0.20%	8.87	0.89%	0.09%	35.85	0.61%	0.18%	130,686,849	696,326,849	696,327
LIGARANG	565,640,000	5039	0.46%	0.11%	514	0.00	0.13%	6.75	0.68%	0.07%	44.85	0.76%	0.23%	112,297,479	677,937,479	677,937
LING	565,640,000	5288	0.48%	0.12%	603	0.00	0.16%	5.75	0.58%	0.06%	20.72	0.35%	0.11%	90,930,551	656,570,551	656,571
LANG	565,640,000	2392	0.22%	0.05%	324	0.00	0.08%	3.35	0.34%	0.03%	41.48	0.71%	0.21%	79,158,639	644,798,639	644,799
GONG	565,640,000	3163	0.29%	0.07%	376	0.00	0.10%	4.54	0.46%	0.05%	44.44	0.40%	0.12%	69,095,983	634,735,983	634,736
LET	565,640,000	9247	0.84%	0.21%	770	0.01	0.20%	4.37	0.44%	0.04%	12.82	0.2	0.07%	107,194,184	672,834,184	672,834
MIHARIO	565,640,000	8021	0.73%	0.18%	889	0.01	0.23%	28.59	2.88%	0.29%	37.51	0.64%	0.19%	184,156,237	749,796,237	749,796
C. KARMINJAWA																
RUMUNJAWA	565,640,000	4557	0.41%	0.10%	232	0.00	0.06%	46.24	4.66%	0.47%	34.95	0.60%	0.18%	166,707,282	732,347,282	732,347
MUJAN	565,640,000	2829	0.26%	0.06%	240	0.00	0.06%	16.26	1.64%	0.16%	35.18	0.60%	0.18%	96,976,531	662,617,531	662,617
IRANG	565,640,000	1079	0.10%	0.02%	116	0.00	0.03%	7.09	0.71%	0.07%	48.08	0.82%	0.25%	76,662,879	642,302,879	642,303
AMUK	565,640,000	551	0.05%	0.01%	0	-	0.00%	1.34	0.14%	0.01%	64.09	1.09%	0.33%	72,893,393	638,535,393	638,535
C. TAHUNAN																
ABUL	565,640,000	13401	1.22%	0.30%	1431	0.01	0.37%	6.05	0.61%	0.06%	20.22	0.34%	0.10%	173,365,894	739,006,894	739,006
NGICH	565,640,000	6601	0.60%	0.15%	563	0.00	0.15%	2.73	0.28%	0.03%	27.08	0.46%	0.14%	95,320,026	660,960,026	660,960
KODONO	565,640,000	6314	0.57%	0.14%	961	0.01	0.25%	1.82	0.18%	0.02%	29.15	0.50%	0.15%	115,564,467	681,204,467	681,204
TEKEYAN	565,640,000	5354	0.49%	0.12%	995	0.01	0.26%	2.29	0.23%	0.02%	27.06	0.46%	0.14%	111,656,969	677,297,969	677,297
ANGUNAN	565,640,000	1849	0.17%	0.04%	154	0.00	0.04%	0.59	0.06%	0.01%	39.56	0.67%	0.20%	59,822,965	625,462,965	625,463
ATAR	565,640,000	2032	0.18%	0.05%	277	0.00	0.07%	0.64	0.06%	0.01%	32.66	0.56%	0.17%	60,107,543	625,747,543	625,748
MAT	565,640,000	2076	0.19%	0.05%	366	0.00	0.10%	1.85	0.19%	0.01%	28.00	0.48%	0.14%	62,680,852	628,320,852	628,321
UEAWUR	565,640,000	1727	0.16%	0.04%	223	0.00	0.06%	0.80	0.08%	0.02%	37.38	0.64%	0.9%	61,080,231	626,720,231	626,720
MANGAN	565,640,000	2377	0.22%	0.05%	259	0.00	0.07%	0.66	0.07%	0.01%	23.22	0.40%	0.12%	50,853,542	616,493,542	616,494
SAMBIBI	565,640,000	5396	0.49%	0.12%	423	0.00	0.11%	1.43	0.14%	0.01%	29.48	0.50%	0.15%	81,996,666	647,637,666	647,637
ANTINGAN	565,640,000	12090	1.10%	0.28%	948	0.01	0.25%	2.43	0.24%	0.02%	20.86	0.36%	0.11%	134,512,093	700,152,093	700,152
HUNAN	565,640,000	14813	1.35%	0.34%	1343	0.01	0.35%	3.04	0.31%	0.03%	22.31	0.38%	0.11%	171,225,484	736,865,484	736,865
LAPI	565,640,000	16501	1.50%	0.38%	1422	0.01	0.37%	8.82	0.89%	0.09%	20.15	0.34%	0.10%	193,113,234	758,753,234	758,753
NENAN	565,640,000	7657	0.70%	0.17%	817	0.01	0.21%	2.35	0.24%	0.02%	23.83	0.41%	0.12%	109,653,453	675,293,453	675,293
PAPYAK	565,640,000	11362	1.03%	0.26%	809	0.01	0.21%	3.41	0.34%	0.03%	29.11	0.50%	0.15%	134,376,666	700,017,666	700,017
C. NALUMISARI																
MBINGREIO	565,640,000	5151	0.47%	0.12%	766	0.01	0.20%	2.00	0.20%	0.02%	38.13	0.65%	0.19%	109,509,120	675,149,120	675,149
NGGULPANDEAN	565,640,000	4552	0.41%	0.10%	626	0.00	0.16%	2.83	0.29%	0.03%	30.91	0.53%	0.16%	93,319,039	658,959,039	658,959
INGTULIS	565,640,000	3841	0.35%	0.09%	353	0.00	0.09%	2.75	0.28%	0.03%	21.77	0.37%	0.11%	65,575,689	631,215,689	631,216

KEPALA SKRIP
PEMANGKUL

KEPALA BAGIAN
HUKUM



Nama Desa	Alokasi Berdasarkan Formula											Jumlah Dana Desa per-Desa	JUMLAH DAN			
	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					(15)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18) = (3) + (17)	(19)
JATISARI	565,640,000	1814	0.17%	0.04%	235	0.00	0.06%	1.03	0.10%	0.01%	42.43	0.72%	0.22%	67,935,617	633,575,617	633,575,617
GEMIRING KIDUL	565,640,000	3551	0.32%	0.08%	488	0.00	0.13%	1.37	0.14%	0.01%	28.61	0.49%	0.15%	75,774,966	641,414,966	641,414,966
GEMIRING LOR	565,640,000	6009	0.55%	0.14%	809	0.01	0.21%	3.50	0.35%	0.04%	25.44	0.43%	0.13%	105,577,632	671,217,632	671,217,632
MALJUMSARI	565,640,000	5678	0.52%	0.13%	672	0.00	0.17%	2.84	0.29%	0.03%	30.78	0.52%	0.16%	100,946,469	666,586,469	666,586,469
TRITIS	565,640,000	1578	0.14%	0.04%	144	0.00	0.04%	0.74	0.07%	0.01%	32.71	0.56%	0.17%	51,112,106	616,752,106	616,752,106
DAREN	565,640,000	5023	0.46%	0.11%	474	0.00	0.12%	1.87	0.19%	0.02%	21.12	0.36%	0.11%	75,086,171	640,726,171	640,726,171
KARANGNONGKO	565,640,000	3685	0.34%	0.08%	328	0.00	0.09%	1.40	0.14%	0.01%	35.56	0.61%	0.18%	75,220,066	640,860,066	640,860,066
NGETUK	565,640,000	5200	0.47%	0.12%	474	0.00	0.12%	4.59	0.46%	0.05%	32.51	0.55%	0.17%	93,564,186	659,204,186	659,204,186
BEANPETE	565,640,000	3593	0.33%	0.08%	636	0.00	0.17%	2.94	0.30%	0.03%	27.49	0.47%	0.14%	85,979,914	651,619,914	651,619,914
MURIYOLOBO	565,640,000	6263	0.57%	0.14%	1159	0.01	0.30%	7.61	0.77%	0.08%	43.42	0.74%	0.22%	152,988,544	718,628,544	718,628,544
BATEGEDE	565,640,000	8693	0.79%	0.20%	1262	0.01	0.33%	18.71	1.89%	0.19%	34.17	0.58%	0.17%	183,227,579	748,867,579	748,867,579
DOHRANG	565,640,000	4580	0.42%	0.10%	485	0.00	0.13%	2.78	0.28%	0.03%	41.86	0.71%	0.21%	97,333,214	662,973,214	662,973,214
KEC. KALINYAMATAN																
BATUKALI	565,640,000	1772	0.16%	0.04%	236	0.00	0.06%	3.42	0.34%	0.03%	34.90	0.59%	0.18%	64,819,294	630,459,294	630,459,294
BANDUNGREJO	565,640,000	6376	0.58%	0.15%	487	0.00	0.13%	3.14	0.32%	0.03%	25.06	0.43%	0.13%	88,916,777	654,556,777	654,556,777
BANYUPUTIH	565,640,000	5349	0.49%	0.12%	284	0.00	0.07%	2.59	0.2	0.03%	40.68	0.69%	0.21%	88,546,980	654,186,980	654,186,980
PENDOSAWALAN	565,640,000	4863	0.44%	0.11%	456	0.00	0.12%	2.51	0.25%	0.03%	42.08	0.72%	0.21%	96,981,947	662,621,947	662,621,947
DAMARJATI	565,640,000	6728	0.61%	0.15%	779	0.01	0.20%	4.97	0.56%	0.05%	31.13	0.53%	0.16%	116,397,435	682,037,435	682,037,435
PURWOKONDO	565,640,000	4850	0.44%	0.11%	290	0.00	0.08%	1.03	0.10%	0.01%	23.61	0.40%	0.12%	65,297,175	630,937,175	630,937,175
MARGOYOJO	565,640,000	5484	0.50%	0.12%	515	0.00	0.13%	1.27	0.13%	0.01%	19.09	0.33%	0.10%	76,050,861	641,690,861	641,690,861
SENDANG	565,640,000	3724	0.34%	0.08%	195	0.00	0.05%	0.99	0.10%	0.01%	36.66	0.62%	0.19%	68,594,787	634,234,787	634,234,787
KRIYAN	565,640,000	5346	0.49%	0.12%	428	0.00	0.11%	0.97	0.10%	0.01%	22.85	0.39%	0.12%	74,081,792	639,721,792	639,721,792
ROBAYAN	565,640,000	7704	0.70%	0.18%	451	0.00	0.12%	1.12	0.11%	0.01%	26.63	0.45%	0.14%	90,674,879	656,314,879	656,314,879
BAKALAN	565,640,000	5013	0.46%	0.11%	231	0.00	0.06%	1.26	0.13%	0.01%	21.85	0.37%	0.11%	61,525,662	627,165,662	627,165,662
MAWANGADING	565,640,000	2498	0.23%	0.06%	245	0.00	0.06%	0.81	0.08%	0.01%	28.74	0.49%	0.15%	56,799,407	622,439,407	622,439,407
KEC. KEMBARANG																
DUDAK AWU	565,640,000	2629	0.24%	0.06%	452	0.00	0.12%	7.48	0.75%	0.08%	41.78	0.71%	0.21%	96,089,647	661,729,647	661,729,647
SUMANDING	565,640,000	2882	0.26%	0.07%	402	0.00	0.10%	7.51	0.76%	0.08%	40.60	0.69%	0.21%	93,427,493	659,067,493	659,067,493
BUCU	565,640,000	4115	0.37%	0.09%	802	0.01	0.21%	9.90	1.00%	0.10%	42.39	0.72%	0.22%	127,478,546	693,118,546	693,118,546
CEPOGO	565,640,000	8870	0.81%	0.20%	1676	0.01	0.44%	7.57	0.76%	0.08%	35.81	0.61%	0.18%	184,807,431	750,447,431	750,447,431
PEMBEM	565,640,000	6663	0.61%	0.15%	1214	0.01	0.32%	5.04	0.51%	0.05%	30.30	0.52%	0.15%	138,649,615	704,289,615	704,289,615
JINGGOTAN	565,640,000	4768	0.43%	0.11%	567	0.00	0.15%	11.08	1.12%	0.11%	31.99	0.54%	0.16%	109,453,595	675,093,595	675,093,595
DERMOLO	565,640,000	5116	0.47%	0.12%	642	0.00	0.17%	9.79	0.99%	0.10%	34.55	0.59%	0.18%	115,117,058	680,757,058	680,757,058
KALIAMAN	565,640,000	7139	0.65%	0.16%	1029	0.01	0.27%	6.37	0.64%	0.06%	31.00	0.53%	0.16%	134,480,658	700,130,658	700,130,658
TURAHAN	565,640,000	10571	0.96%	0.24%	1402	0.01	0.36%	15.99	1.61%	0.16%	29.35	0.50%	0.15%	188,806,920	754,446,920	754,446,920
BALONG	565,640,000	5355	0.49%	0.12%	567	0.00	0.15%	14.11	1.42%	0.14%	40.69	0.69%	0.21%	127,671,369	693,311,369	693,311,369
KANCILAN	565,640,000	9210	0.84%	0.21%	980	0.01	0.25%	11.28	1.14%	0.11%	30.68	0.52%	0.16%	151,442,428	717,082,428	717,082,428



Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula										Pagu Dana Desa per-Desa	JUMLAH DANA				
		Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (17)	(19)
KEC. PAKISAJI	565,640,000	12566	1.14%	0.29%	1609	0.01	0.42%	9.60	0.97%	0.10%	27.52	0.47%	0.14%	194,045,844	759,685,844	759,685,844	759,685,844
KAB. LABAK	565,640,000	12216	1.11%	0.28%	1332	0.01	0.35%	7.61	0.77%	0.08%	33.79	0.58%	0.17%	180,047,395	745,687,395	745,687,395	745,687,395
KAB. SUJAWAL TIMUR	565,640,000	6251	0.57%	0.14%	1123	0.01	0.29%	5.63	0.57%	0.06%	30.97	0.53%	0.16%	133,780,778	699,420,778	699,420,778	699,420,778
KAB. KAWAK	565,640,000	4566	0.42%	0.10%	1074	0.01	0.28%	3.65	0.37%	0.04%	31.47	0.54%	0.16%	119,662,638	685,302,638	685,302,638	685,302,638
KAB. TANJUNG	565,640,000	6546	0.60%	0.15%	938	0.01	0.24%	17.31	1.74%	0.17%	37.75	0.64%	0.19%	156,669,599	722,309,599	722,309,599	722,309,599
KAB. PULAU	565,640,000	7602	0.69%	0.17%	1459	0.01	0.38%	10.45	1.05%	0.11%	28.00	0.48%	0.14%	164,997,054	730,637,054	730,637,054	730,637,054
KAB. SELAJI	565,640,000	3551	0.32%	0.08%	652	0.00	0.17%	3.66	0.37%	0.04%	30.90	0.53%	0.16%	91,723,848	657,363,848	657,363,848	657,363,848
KAB. PIAMBAN	565,640,000	4757	0.43%	0.11%	557	0.00	0.14%	2.65	0.27%	0.03%	32.93	0.56%	0.17%	92,337,768	657,977,768	657,977,768	657,977,768
KEC. DONOROJO	565,640,000	2884	0.26%	0.07%	409	0.00	0.11%	5.20	0.52%	0.05%	49.36	0.84%	0.25%	98,233,108	663,873,108	663,873,108	663,873,108
KAB. LUMBEREJO	565,640,000	5445	0.50%	0.12%	430	0.00	0.11%	23.67	2.39%	0.24%	38.53	0.66%	0.20%	138,347,513	703,987,513	703,987,513	703,987,513
KAB. CLERING	565,640,000	5251	0.48%	0.12%	642	0.00	0.17%	11.67	1.18%	0.12%	36.83	0.63%	0.19%	122,060,471	687,700,471	687,700,471	687,700,471
KAB. JUJUNGWATU	565,640,000	8223	0.75%	0.19%	1120	0.01	0.29%	22.34	2.25%	0.23%	31.22	0.53%	0.16%	177,854,867	743,494,867	743,494,867	743,494,867
KAB. BANYUMANIS	565,640,000	13991	1.27%	0.32%	1521	0.01	0.39%	15.33	1.54%	0.15%	31.63	0.54%	0.16%	212,257,509	777,897,509	777,897,509	777,897,509
KAB. TULUKAN	565,640,000	7313	0.67%	0.17%	573	0.00	0.15%	10.34	1.04%	0.10%	42.86	0.73%	0.22%	131,628,363	697,268,363	697,268,363	697,268,363
KAB. BANDUNGHARJO	565,640,000	9550	0.87%	0.22%	1190	0.01	0.31%	14.40	1.45%	0.15%	42.39	0.72%	0.22%	183,098,843	748,738,843	748,738,843	748,738,843
KAB. BILINGOH	565,640,000	1561	0.14%	0.04%	246	0.00	0.06%	4.60	0.46%	0.05%	43.95	0.75%	0.22%	76,358,433	641,998,433	641,998,433	641,998,433
JUGO																	
Total	104,077,760,000	1,098,764	100%	25%	134817	100%	35%	992.43	100%	10%	5872.28	100%	30%	20,622,072,000	124,699,832,000	124,699,832,000	124,699,832,000

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (f)

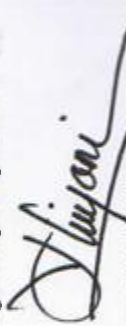
Kontrol Penghitungan	
Kabupaten X	124,699,832,000 (c)
Alokasi Dasar (90%)	104,077,760,000 (d)
Saluran Formula (10%)	20,622,072,000 (e)
Dana	184 (f)

BUPATI JEPARA


AHMAD MARZUQI

Jepara, Januari 2016

Petugas Penghitung Dana Desa (k)


YENNY DIAH SULISTIYANI, S.STP, MH
NIP. 19790108.199711.2.001

Pejabat berwewenang/bertanggung jawab (l)


DENI HEN PARKO, S.Sos, MM
NIP. 19690623.199001.1.001

PITIAN PRODUK HUKUM	
ABATAN	PARAF
	
184	

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA (DD) TAHAP
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

NO	JUMLAH ANGGARAN	SP2D / TGL PENERIMAAN DI REK. DESA	TGL PENCAIRAN DARI REK. DESA	KET
1				
2				
3				
	0			

Mengetahui
 CAMAT

PETINGGI

(.....)

(.....)

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

PEKERJA	PRODUK HUKUM
Sekretaris	
Asisten I	
Kepala Bk	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengasut	
BAGIAN HUKUM	

KEPALA SKPD PENGASUT	KEPALA BAGIAN HUKUM
----------------------	---------------------

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN	SALDO	KET
			(DEBIT)	(KREDIT)		
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1.	Dana Desa					
1.2.1. 1	TAHAP PERTAMA					
1.2.1. 2	TAHAP KEDUA					
1.2.1. 3	TAHAP KE TIGA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan. dst.					
2.3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	kegiatan. Dst.					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	kegiatan. Dst.					
2.5	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.5.1	Kegiatan					
2.5.2	kegiatan. Dst.					
	JUMLAH					

Mengetahui
CAMAT

PETINGGI

(.....)

(.....)

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala	
Kasubid	
Kepala	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI

KEPALA SAKD PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
	1

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN JEPARA

Pagu Kab Rp.

KODE REK.	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	PENYALURAN			PENGGUNAAN			KET
			JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENYALURAN KE DESA (KREDIT)	SALDO	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT)	JUMLAH PENYALURAN KE DESA (KREDIT)	SALDO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10
A	PENDAPATAN								
A.1	Pendapatan Transfer Saldo Awal TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA TAHAP KE TIGA								
B.1	BELANJA BANTUAN KE DESA								
B.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
B.1.1.1	Kegiatan								
B.1.1.2	Kegiatan. dst.								
B.1.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
B.1.2.1	Kegiatan								
B.1.2.2	kegiatan. Dst.								
B.1.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
B.1.3.1	Kegiatan								
B.1.3.2	kegiatan. Dst.								
B.1.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
B.1.4.1	Kegiatan								
B.1.4.2	kegiatan. Dst.								
B.2	BELANJA BANTUAN KE DESA dst								
B.2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								
B.2.2.1	Kegiatan								
B.2.2.2	kegiatan. Dst.								
B.2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
B.2.3.1	Kegiatan								
B.2.3.2	kegiatan. Dst.								
	JUMLAH								

Mengetahui
CAMAT

Disetujui oleh,
PETINGGI

.....

(.....)

Keterangan Kolom

- 3 Di isi Tanggal dan Nomor SP2D/ bukti lainnya yang sah Penyaluran Dana Desa dari Kab/Kota atau dari Kab/Kota
- 4 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kab/Kota
- 5 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Kab/Kota ke Desa
- 6 Di isi selisih antara penerimaan dan penyaluran
- 7 Di isi Jumlah nilai SP2D dari Pusat ke Kab/Kota
- 8 Di isi Jumlah nilai kegiatan
- 9 Di isi selisih antara penerimaan dari Pusat dan penggunaan di desa
- 10 Penjelasan sebab terjadinya selisih
- B.1.2.1 Di isi dengan nama kegiatan/output seperti Jalan Desa, Embungdst Desa, Kelompok Usaha Tani dst

BUPATI JEPARA,

[Handwritten Signature]

KEPALA SKPD PENYALUR	KEPALA BAGIAN HUKUM
<i>[Handwritten Signature]</i>	1